

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP

PADA KABUPATEN PURWOREJO

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Akuntansi (S1)**

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

Arum Wandira

NPM: 16 04 22800

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA,

JUNI 2020

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP

PADA KABUPATEN PURWOREJO

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Akuntansi (S1)**

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh:

Arum Wandira

NPM: 16 04 22800

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

YOGYAKARTA,

JUNI 2020

Skripsi

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP

PADA KABUPATEN PURWOREJO



Disusun oleh:

Arum Wandira

NPM: 16 04 22800

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.", is written over the name.

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

2 Juni 2020



SURAT KETERANGAN

No. 432/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Juli 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. (Ketua Penguji)
2. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. (Anggota)
3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. (Anggota)

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Arum Wandira

NPM : 160422800

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Arum Wandira telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP PADA KABUPATEN PURWOREJO

benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Yang menyatakan



Arum Wandira

KATA PENGANTAR

Dengan menghaturkan puji syukur dan terima kasih atas rahmat dan hidayah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan berkat-Nya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sehingga tersusunlah skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Terhadap Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat sarjana akuntansi (S1) pada program studi akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi, saya selaku penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua yang sangat penulis cintai, cici Bunga Natalia, adik Melati Sukma. Terima kasih karena sudah menjadi bagian terbaik di hidup penulis, terima kasih untuk doa dan dukungan yang tanpa lelah kalian berikan kepada penulis yang selalu menyertai hari-hari penulis.
2. Bapak Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, mengajarkan, meluangkan waktu, dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing penulis.
3. Dosen-dosen di UAJY khususnya Bapak Heni Kurniawan, Ibu Sukmawati, Bapak Wimpie, Bapak Andre, Ibu Ignatia, dan dosen

fakultas bisnis dan ekonomika lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang sudah bapak/ibu berikan.

4. Teman-teman seperjuangan (Tiwi, Sella, Artha, Vivian, Amik, Fanny, Berthi). Terima kasih atas pengalaman dan pelajaran baru yang kalian berikan kepada penulis. Semoga pertemanan ini selalu terjaga hingga kita menua.
5. Teman-teman dari masa kecil (Lintang, Varren, Priska). Terima kasih atas kebersamaan selama ini, kalian akan selalu menjadi sahabat dan keluarga penulis.
6. Para karyawan staff TU dan Dekanat di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pada responden penelitian dan Bpk Bambang selaku Kepala Sub Bagian Organisasi Kabupaten Purworejo. Terima kasih telah bersedia menjadi responden penelitian ini dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
8. Anggota Kesekretariatan ASAC. Terima kasih telah berdinamika bersama penulis sehingga penulis memiliki pengalaman baru.
9. Doni Setyawan, S.Kom. Terima kasih atas dukungan dan nasihat yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga hari-hari mu selalu dilimpahkan berkah.
10. Pihak-pihak lain yang juga turut membantu penulis dalam mengerjakan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan yang membangun penulis agar kedepannya dapat melakukan penelitian yang juga dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 2 Juni 2020

Penulis



Arum Wandira

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

TUHAN YANG MAHA ESA

(ALM) PAPA TJIANG HWA TJOEK

MAMA PARTINI

BAPAK DWIJO MUDIARTO

BUNGA NATALIA

MELATI SUKMA

SELURUH KELUARGA

TEMAN DAN SAHABATKU

ORANG-ORANG YANG KU KASIHI

**“RAIHLAH SETINGGI MUNGKIN APA YANG INGIN KAMU CAPAI
DAN JANGAN LUPA UNTUK LIBATKAN TUHAN DI DALAMNYA”**

-ARUM WANDIRA-

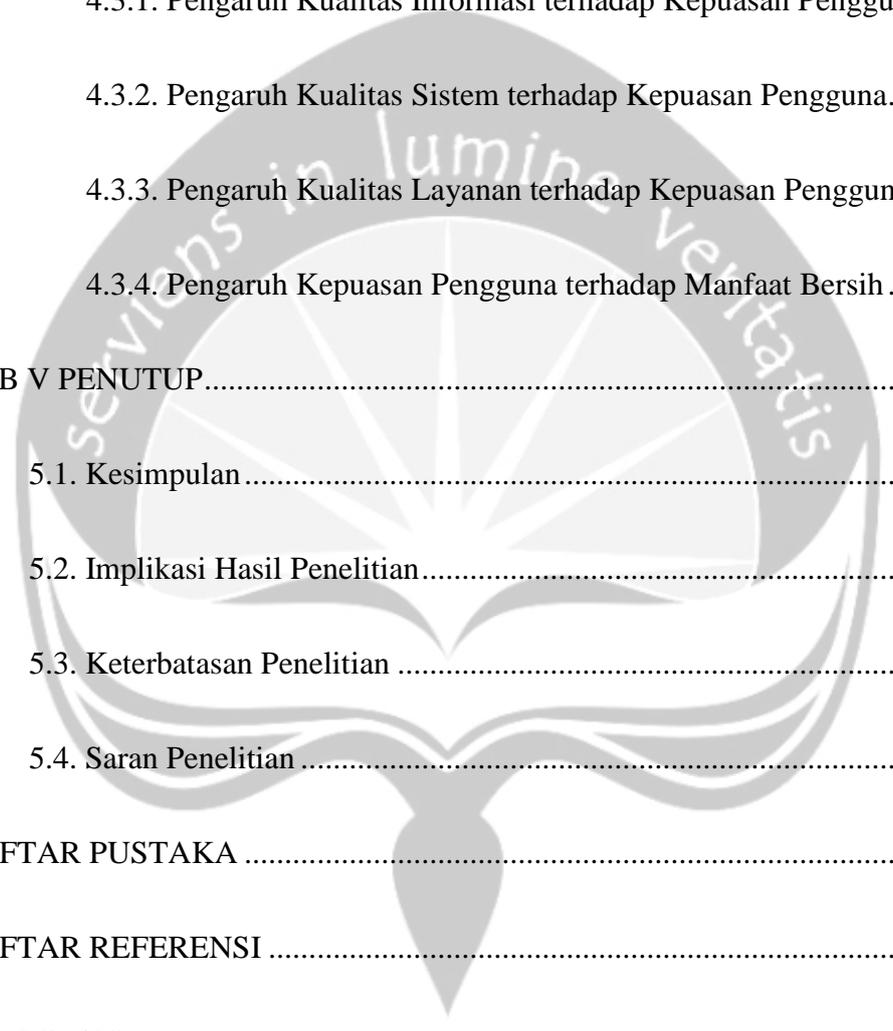
DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
 BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	 9
2.1. Kinerja Instansi Pemerintah	9
2.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
2.1.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12
2.2. Implementasi SIMDA SAKIP	13
2.2.1. Kesuksesan Sistem Informasi	15
2.2.1.1. Kualitas Informasi (<i>Information Quality</i>)	17
2.2.1.2. Kualitas Sistem (<i>System Quality</i>)	18
2.2.1.3. Kualitas Layanan (<i>Service Quality</i>)	18
2.2.1.4. Kepuasan Pengguna (<i>User Satisfaction</i>)	18
2.2.1.5. Manfaat Bersih (<i>Net Benefits</i>)	19
2.3. Kerangka Konseptual	19
2.3.1. Hubungan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna	19
2.3.2. Hubungan Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna	20

2.3.3. Hubungan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna	21
2.3.4. Hubungan Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih	21
2.4. Penelitian Terdahulu	22
2.5. Pengembangan Hipotesis	29
2.5.1. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna	29
2.5.2. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna	30
2.5.3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna	31
2.5.4. Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Objek Penelitian	35
3.2. Populasi Penelitian	35
3.3. Sampel	36
3.4. Variabel Penelitian	36
3.5. Operasionalisasi Variabel	37
3.6. Model Penelitian	40
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.7.1. Jenis Data	40
3.7.2. Teknik Pengumpulan Data	41

3.8. Analisis Data.....	41
3.8.1. Statistik Deskriptif.....	43
3.8.2. Model Pengukuran.....	43
3.8.2.1. Uji Validitas	43
3.8.2.2. Uji Reliabilitas	45
3.8.3. Model Struktural.....	45
3.8.4. Uji Hipotesis	46
3.9. Rencana Pembahasan.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
4.1.1. Gambaran Kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo ...	48
4.1.2. Deskripsi Responden Penelitian	48
4.1.3. Gambaran Responden.....	51
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data	54
4.2.1. Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2. Model Pengukuran.....	56
4.2.2.1. Uji Validitas	56
4.2.2.2. Uji Reliabilitas	60



4.2.3. Model Struktural.....	61
4.2.4. Uji Hipotesis	64
4.3. Pembahasan	68
4.3.1. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna.....	69
4.3.2. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna.....	69
4.3.3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna.....	70
4.3.4. Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih	72
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Implikasi Hasil Penelitian.....	77
5.3. Keterbatasan Penelitian	79
5.4. Saran Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR REFERENSI	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel	3.1	Operasionalisasi Variabel.....	37
Tabel	4.1	Hasil Distribusi Penyebaran Kuesioner	49
Tabel	4.2	Profil Responden.....	51
Tabel	4.3	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	55
Tabel	4.4	Nilai <i>Loading Factor</i>	57
Tabel	4.5	Nilai AVE	58
Tabel	4.6	Nilai <i>Cross Loading</i>	59
Tabel	4.7	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	61
Tabel	4.8	Nilai Koefisien Determinasi (<i>R-squared</i>)	62
Tabel	4.9	Nilai <i>Goodness of Fit</i>	63
Tabel	4.10	Nilai Relevansi Prediktif (<i>Q-squared</i>)	64
Tabel	4.11	Nilai Koefisien Jalur (<i>Path Coefficients</i>).....	66
Tabel	4.12	<i>P-values</i>	66
Tabel	4.13	Hasil Uji Hipotesis	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003).....	16
Gambar 3.1	Model Penelitian	40
Gambar 4.1	Pengujian Model Penelitian	65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Konvergen
- Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Diskriminan
- Lampiran 6. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 7. Hasil Uji *Goodness of Fit*
- Lampiran 8. Hasil *Path Coefficients* dan *P Values*
- Lampiran 9. Tampilan SIMDA SAKIP
- Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah

**EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP
PADA KABUPATEN PURWOREJO**

Disusun oleh:

Arum Wandira

NPM: 16 04 22800

Pembimbing:

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

Abstrak

Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo berlangsung sejak tahun 2018. Sebelum adanya penerapan SIMDA SAKIP, antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum terintegrasi sehingga kinerja belum efektif dan efisien, selain itu minimnya sumber daya manusia yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja perangkat daerah, karena SIMDA SAKIP bersifat *mandatory* dan pada objek tersebut belum diketahui dampak dari implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD. Pengujian dampak dari implementasi tersebut menggunakan model DeLone dan McLean (2003) yang telah dimodifikasi oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner kepada pengguna SIMDA SAKIP di 41 OPD Kabupaten Purworejo. Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis SEM berbasis varian (PLS) dengan menggunakan software *WarpPLS 7.0*. Statistik deskriptif juga dilakukan untuk melihat pola jawaban responden.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model DeLone dan McLean (2003) yang telah dimodifikasi oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020) penerapan SIMDA SAKIP telah sukses dan memberikan dampak positif pada manfaat kinerja OPD.

Kata Kunci: Implementasi SIMDA SAKIP, Dampak, Model DeLone dan McLean (2003).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pemerintah merupakan hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah). Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* dan *output*, tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Nordiawan dan Hertianti, 2010). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Keuangan mendorong para kepala daerah untuk mengoptimalkan APBN dan APBD. Mengingat bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah (kemenkeu.go.id). Dari tahun ke tahun, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran ke daerah. Namun, peningkatan alokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Kementerian keuangan menemukan beberapa permasalahan, seperti jumlah belanja pegawai jauh lebih besar dibanding belanja modal, penyerapan anggaran belum optimal, dan ketimpangan pelayanan publik antardaerah. Sehingga, perbaikan pada pengelolaan, perencanaan, dan *monitoring* keuangan menjadi suatu kebutuhan dan penting untuk dilakukan (cnnindonesia.com).

Meskipun sudah diatur oleh Pemerintah pada PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih terdapat

beberapa permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah, salah satunya yaitu pada Kabupaten Purworejo. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Sub Bagian Organisasi, pada Kabupaten Purworejo antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan belum terintegrasi sehingga kinerja belum efektif dan efisien. Selain itu minimnya sumber daya manusia sehingga kinerja yang dihasilkan belum optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dan mengatasi permasalahan yang ada, Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 melakukan upaya dengan mengimplementasikan SIMDA SAKIP (Sistem Informasi Manajemen Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo didasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. SIMDA SAKIP adalah sistem untuk pelaporan kinerja yang merupakan salah satu wujud dari pengendalian internal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian PANRB dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah melalui pengintegrasian proses perencanaan, penganggaran, kinerja, dan keuangan (bpkp.go.id). Integrasi merupakan wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur. Namun, setelah sistem diterapkan masih terdapat permasalahan yang terjadi. Terkait penyusunan LKjIP 2018, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan data dan informasi capaian kinerja pemerintah daerah, seperti belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan, sistem pembangunan, penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan belum sepenuhnya menggambarkan penggunaan APBD tahun 2018 (bpkp.go.id).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan dampak positif penerapan teknologi pada kinerja organisasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020) pada pemerintah daerah pedesaan di Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa dengan penerapan teknologi SISKEUDES pemerintah daerah pedesaan tersebut dapat mengelola keuangan lebih efektif dan efisien. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Prameswara (2018) pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kota Denpasar menunjukkan bahwa penerapan SIPKD tergolong sukses. Hal ini terbukti bahwa pengguna merasa puas sehingga dapat meningkatkan kinerja individu, namun terdapat beberapa kekurangan seperti pengguna kurang dapat mengubah data yang tersedia sesuai kebutuhan pekerjaan dan pengguna kurang merasa aman dalam mengakses atau mengirim data melalui SIPKD. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2017) pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa kepuasan karyawan dalam menggunakan SIMDA dapat mendorong terciptanya kinerja atau produktivitas

yang lebih baik dari para karyawan di Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar. Hal tersebut tercermin dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa pengguna merasa puas dengan data dan informasi yang didapat dari SIMDA. Kemudian, penelitian yang dilakukan Tan *et al.* (2015) pada SKPD Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa dalam mengembangkan SIKD perlu memperhatikan komponen-komponen dalam pengembangan sistem seperti fleksibilitas sistem, integrasi sistem, waktu respon/perubahan, kenyamanan akses, pemulihan, dan kemudahan pengguna. Dalam penelitian tersebut, kualitas sistem merupakan penentu kesuksesan implementasi SIKD. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Iivari (2005) pada Oulu *City Council* dimana karyawan yang bekerja pada penerapan sistem informasi baru dalam organisasi tersebut menunjukkan bahwa pengguna merasa puas sehingga memberikan dampak pada kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian sebelumnya telah mendapatkan hasil mengenai dampak adanya beberapa sistem pemerintahan daerah. Namun, SIMDA SAKIP sendiri baru diterapkan pada tahun 2018 di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo merupakan pemerintah daerah pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP (bpkp.go.id). Hal tersebut membuat belum diketahui dampak diterapkannya SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kesuksesan sistem informasi pemerintah dapat diidentifikasi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Sejak diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui tahun 2003, model kesuksesan sistem informasi yang dikembangkan oleh DeLone dan McLean telah banyak diterapkan pada beberapa penelitian (Tan *et al.*, 2015). DeLone dan McLean (1992)

terdiri dari enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem informasi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual, dan dampak organisasi. Sementara model kesuksesan DeLone dan McLean (2003) menambahkan variabel kualitas layanan ke dalam modelnya, serta menggabungkan variabel dampak individu dan dampak organisasi menjadi variabel manfaat bersih (*net benefits*). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan variabel independen kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Kemudian variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu kepuasan pengguna. Peneliti tidak menggunakan variabel penggunaan karena penggunaan SIMDA SAKIP adalah wajib (*mandatory*), sedangkan penggunaan sistem lebih sesuai untuk implementasi sistem yang bersifat *voluntary*. Hal tersebut telah dibuktikan dalam penelitian Hariwibowo dan Setiawan (2020) tidak menggunakan variabel penggunaan dengan alasan bahwa SISKEUDES adalah *mandatory*. Kemudian dalam penelitian Gable *et al.* (2008) menyatakan bahwa variabel penggunaan harus dihapus dalam model DeLone dan McLean ketika penggunaan sistem informasi bersifat wajib. Selain itu, dalam penelitian Iivari (2005), menunjukkan bahwa variabel penggunaan tidak berpengaruh signifikan pada dampak individu dalam sistem informasi wajib. Kemudian, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manfaat bersih (*net benefits*).

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan sistem informasi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Penelitian ini penting dilakukan karena sejak diterapkannya SIMDA SAKIP pada tahun 2018 di

Kabupaten Purworejo belum diketahui dampak penerapan sistem tersebut terhadap kinerja perangkat daerah yang dimana salah satu tujuan diterapkannya SIMDA SAKIP ini untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam mengetahui faktor-faktor penentu kesuksesan apa yang menjadi poin penting sebagai saran perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam SIMDA SAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengevaluasi mengenai implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo karena pada objek tersebut belum diketahui dampak dari implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD. Pemilihan OPD Kabupaten Purworejo sebagai objek penelitian karena Kabupaten Purworejo merupakan pemerintah daerah pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP (bpkp.go.id). Kabupaten Purworejo mengimplementasikan SIMDA SAKIP sejak tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Evaluasi Terhadap Implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang mengenai masalah yang terjadi pada Kabupaten Purworejo dimana sebelum penerapan SIMDA SAKIP belum terintegrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang menyebabkan kinerja belum efektif dan efisien, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD Kabupaten Purworejo menggunakan model DeLone dan McLean (2003). Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
2. Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna?
4. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap manfaat bersih?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengevaluasi implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo yang diharapkan akan berdampak positif terhadap kinerja perangkat daerah, karena SIMDA SAKIP bersifat *mandatory* dan pada objek tersebut belum diketahui dampak dari implementasi SIMDA SAKIP terhadap kinerja OPD.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk penelitian selanjutnya mengenai implementasi SIMDA SAKIP. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan

penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis dengan menggunakan objek yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menerapkan SIMDA SAKIP. Hasil evaluasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja OPD dan meningkatkan kualitas SIMDA SAKIP melalui rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini.



BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi *input* dan *output*, tetapi juga dari sisi *outcome*, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Nordawati dan Hertianti, 2010). Sementara menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah:

“Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.”

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tersebut, kinerja instansi pemerintah fokus pada pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada

kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa *input*, *output*, *outcome*, *benefits*, *impact* sebagai berikut:

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*.
2. Kelompok keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
4. Kelompok manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
5. Kelompok dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tersebut, kegiatan dalam instansi pemerintah harus sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah menjadi gambaran atas suatu keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintah.

2.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.”

Wujud dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tersebut, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat terwujud dengan baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara.
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Jujur, obyektif, transparan, dan akurat.
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi diperlukan suatu instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah:

“Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.”

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut, penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja. Penyelenggaraan SAKIP pada OPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD. Entitas Akuntabilitas Kinerja OPD adalah unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP setiap tahun untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.2. Implementasi SIMDA SAKIP

Menurut Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Untuk dapat mencapai tujuan kegiatan, cara yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan melakukan implementasi SIMDA SAKIP. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKP mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa SAKIP memiliki tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pengintegrasian SIMDA dengan SAKIP merupakan upaya untuk memperkuat keandalan sistem untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja. SIMDA SAKIP adalah sistem untuk pelaporan kinerja yang merupakan salah satu wujud dari pengendalian internal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah melalui pengintegrasian proses perencanaan, penganggaran, kinerja, dan

keuangan (bpkp.go.id). Integrasi merupakan wujud nyata dari anggaran berbasis kinerja sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian, didukung dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur.

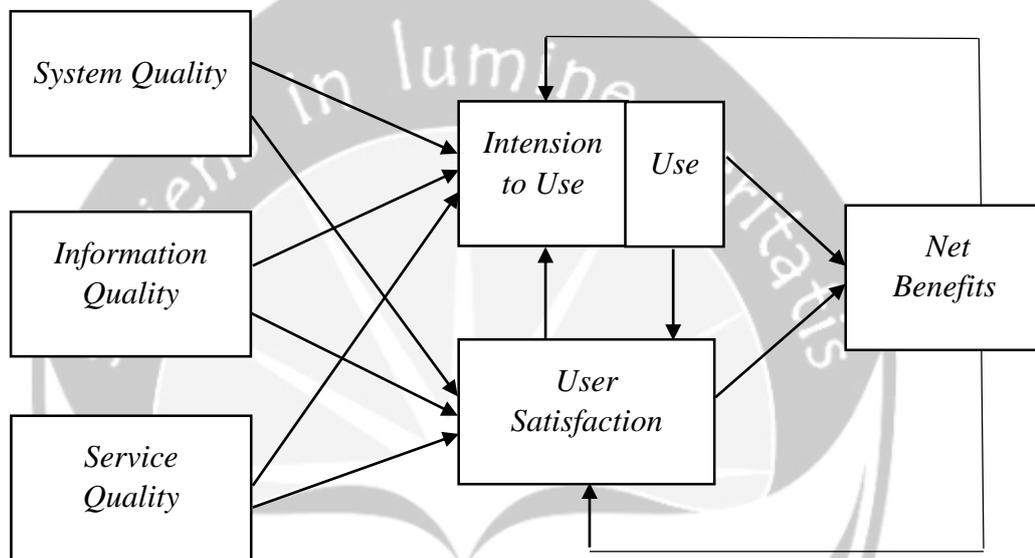
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Sub Bagian Organisasi, implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo didasarkan pada Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Tujuan ditetapkan Peraturannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. SIMDA SAKIP dapat diakses melalui situs <http://sippd.purworejokab.go.id>. Pada *web* tersebut, SIMDA SAKIP dilakukan secara berjenjang yang mencakup indikator kinerja utama, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Indikator kinerja utama (IKU) meliputi sasaran yang menjadi IKU dan non IKU. Kemudian dalam perencanaan kinerja, setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat. Dalam perencanaan kinerja akan menghasilkan *cascading* hasil program – kegiatan perangkat daerah yang berisi sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan. Kemudian, pohon kinerja RPJMD & Renstra berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan perangkat daerah. Sasaran program dan kegiatan harus sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu untuk pembangunan daerah. Selanjutnya, penetapan kinerja berisi pejabat pembuat

dokumen perencanaan kinerja, pelaksana program dan kegiatan, prosentase target indikator sasaran, program, dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan pada setiap program dan kegiatannya. Kemudian, dalam pengukuran kinerja akan membandingkan antara target dan realisasi, serta akan dijelaskan penyebab deviasi dan rencana aksi jika target tidak tercapai. Selanjutnya, laporan-laporan akan dihasilkan pada bagian pelaporan kinerja. Laporan kinerja tersebut dihasilkan secara triwulanan dan tahunan, kemudian akan digunakan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, laporan kinerja yang dihasilkan dari SIMDA SAKIP digunakan untuk pedoman dalam penyusunan LKjIP. Pemerintah daerah dapat mengetahui realisasi kinerja atas perencanaan target hasil kegiatan yang ditetapkan pada awal periode, karena SIMDA SAKIP ini merupakan salah satu wujud dari pengendalian internal yang akan mengambil data masukan dari SIMDA Perencanaan dan SIMDA Keuangan dengan tambahan realisasi kinerja.

2.2.1. Kesuksesan Sistem Informasi

Banyak penelitian di bidang sistem informasi meneliti mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem informasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesuksesan sistem informasi dapat diidentifikasi dengan menggunakan model DeLone dan McLean (2003), misalnya penelitian Tan *et al.* (2015) dan Hariwibowo dan Setiawan (2020). Model kesuksesan sistem informasi pertama diterbitkan pada tahun 1992 yang terdiri dari enam variabel, seperti kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna, dampak individual, dan dampak organisasi (DeLone dan McLean, 1992). Sementara model kesuksesan DeLone dan McLean (2003) menambahkan

variabel kualitas layanan ke dalam modelnya, serta menggabungkan variabel dampak individu dan dampak organisasi menjadi variabel manfaat bersih (*net benefits*). Sehingga model DeLone dan McLean dapat diterapkan untuk berbagai tingkat analisis individu dan organisasi dengan hasil yang lebih relevan (Petter *et al.*, 2008).



Sumber: DeLone dan McLean (2003)

Gambar 2.1

Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone dan McLean (2003)

DeLone dan McLean (2003) memberikan suatu model diperbarui yang dapat digunakan dalam mengukur kesuksesan sistem informasi. Terdapat beberapa dimensi kesuksesan sistem informasi, yaitu Kualitas Informasi (*Information Quality*), Kualitas Sistem (*System Quality*), Kualitas Layanan (*Service Quality*), Minat Menggunakan (*Intention to Use*) atau Penggunaan (*Use*), Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), dan Manfaat Bersih (*Net Benefits*). Pada

penelitian ini, model yang digunakan adalah milik DeLone dan McLean (2003) yang telah dimodifikasi oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020). Pada penelitian Hariwibowo dan Setiawan (2020) tidak menggunakan variabel penggunaan (*use*) dengan alasan bahwa SISKEUDES adalah *mandatory*. Kemudian didukung dengan penelitian Gable *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa variabel penggunaan harus dihapus dalam model DeLone dan McLean ketika penggunaan sistem informasi bersifat wajib. Selain itu, dalam penelitian Iivari (2005), menunjukkan bahwa variabel penggunaan tidak berpengaruh signifikan pada dampak individu dalam sistem informasi wajib. Dalam penelitian ini tidak menggunakan variabel penggunaan karena SIMDA SAKIP merupakan sistem *mandatory*.

2.2.1.1. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi adalah karakteristik yang diinginkan dari *output* sistem yang mengukur kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan-laporan (*reports*) (DeLone dan McLean, 2003). Suatu informasi menjadi berkualitas jika informasi tersebut bermanfaat bagi pemakai informasi. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut terpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Kemudian, informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Jika pemakai tidak dapat menerima informasi yang disajikan, akhirnya informasi akan menjadi tidak digunakan yang berarti tidak bermanfaat jika disediakan. Oleh karena itu, kualitas informasi juga harus sepadan dengan kualitas pemakai (Suwardjono,

2010). Indikator pengukuran kualitas informasi menurut DeLone dan McLean (2003), yaitu *completeness, relevance, ease of understanding, accuracy, timeliness*.

2.2.1.2. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan *hardware* dan *software* dari sistem informasi dapat menyediakan kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Kualitas sistem adalah karakteristik yang diinginkan dari suatu sistem informasi (DeLone dan McLean, 2016). Adapun indikator pengukuran yang direkomendasikan (DeLone dan McLean, 2003), yaitu *usability, flexibility, reliability, integration, dan response time*.

2.2.1.3. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Kualitas layanan adalah kualitas dukungan yang pengguna sistem terima dari departemen sistem informasi dan dukungan personil TI (DeLone dan McLean, 2003). Kualitas layanan merupakan variabel tambahan yang dimasukkan ke dalam model terbaru. Hal tersebut disebabkan karena dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan (DeLone dan McLean, 2003). Indikator pengukuran kualitas layanan menurut DeLone dan McLean (2003), yaitu *responsiveness, assurance, training program, dan empathy*.

2.2.1.4. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna (*user satisfaction*) merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap

pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan (DeLone dan McLean, 1992). Kepuasan pengguna adalah sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem informasi yang tersedia memenuhi kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Adapun indikator pengukuran menurut DeLone dan McLean (2003), yaitu *customer opinion of service* dan *user surveys*.

2.2.1.5. Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Manfaat bersih adalah hasil dari penggunaan sistem informasi yang memberikan kontribusi bagi individu, kelompok, dan organisasi (DeLone dan McLean, 2003). Manfaat bersih merupakan dampak keberadaan dari pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna. Dampak terhadap kualitas kinerja tersebut baik secara individual maupun organisasi termasuk di dalamnya produktivitas, meningkatkan pengetahuan, dan mengurangi lama waktu pencarian informasi (Hartono, 2007). Pengukuran manfaat bersih (DeLone dan McLean, 2003), yaitu *efficiency at work*, *regulatory effectiveness*, dan *job performance*.

2.3. Kerangka Konseptual

2.3.1. Hubungan Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas informasi adalah karakteristik yang diinginkan dari *output* sistem yang mengukur kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan-laporan (*reports*) (DeLone dan McLean, 2003). Suatu informasi menjadi berkualitas jika informasi tersebut bermanfaat bagi pemakai informasi.

Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut terpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Kemudian, informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Jika pemakai tidak dapat menerima informasi yang disajikan, akhirnya informasi akan menjadi tidak digunakan yang berarti tidak bermanfaat jika disediakan. Oleh karena itu, kualitas informasi juga harus sepadan dengan kualitas pemakai (Suwardjono, 2010).

Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi memengaruhi kepuasan pengguna. Jika suatu informasi berkualitas maka pengguna akan merasa puas dan menunjukkan sikap atau tanggapan positif terhadap suatu informasi yang diterimanya. Ketersediaan informasi yang berkualitas baik dapat meningkatkan kinerja pengguna, dengan demikian dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan implementasi sistem (Hariwibowo dan Setiawan, 2020).

2.3.2. Hubungan Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan *hardware* dan *software* dari sistem informasi dapat menyediakan kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Davis (1989), mengusulkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi pengguna untuk menerima dan menggunakan teknologi informasi karena pengguna percaya bahwa sistem akan meningkatkan kinerja. Semakin baik kualitas suatu sistem maka pengguna akan semakin puas (DeLone dan McLean, 2003). Selaras dengan Hartono (2007), semakin tinggi kualitas sistem akan

menyebabkan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, yang selanjutnya akan memengaruhi secara positif produktivitas individu dengan hasil peningkatan produktivitas organisasi. Kualitas sistem informasi juga menunjukkan kinerjanya, yang berarti bahwa sistem berkualitas tinggi menghasilkan lebih sedikit keluhan atau masalah pengguna (Hariwibowo dan Setiawan, 2020).

2.3.3. Hubungan Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas layanan adalah kualitas dukungan yang pengguna sistem terima dari departemen sistem informasi dan dukungan personil TI (DeLone dan McLean, 2003). Kualitas layanan merupakan variabel tambahan yang dimasukkan ke dalam model terbaru. Hal tersebut disebabkan karena dukungan yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan (DeLone dan McLean, 2003). Menurut DeLone dan McLean (2003) semakin baik kualitas layanan maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. Hal ini karena, pengguna akan menunjukkan sikap positif dan puas ketika pengguna mendapatkan layanan bantuan yang berkualitas, seperti layanan yang memuaskan, layanan bantuan yang baik, dan tepat dari penyedia layanan.

2.3.4. Hubungan Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih

Kepuasan pengguna (*user satisfaction*) merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan (DeLone dan McLean, 1992).

Kepuasan pengguna adalah sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem informasi yang tersedia memenuhi kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Kepuasan pengguna juga sering digunakan sebagai ukuran pengganti efektivitas sistem informasi. Jika sistem yang efektif didefinisikan sebagai salah satu yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, maka sistem yang efektif harus memiliki beberapa pengaruh positif pada pengguna, seperti meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan (DeLone dan McLean, 2003). Akibat dari kepuasan pengguna atas suatu sistem informasi, maka manfaat bersih akan terjadi. Jika kepuasan pengguna dirasakan oleh pengguna maka akan membuat manfaat bersih juga mudah dicapai (DeLone dan McLean, 2003).

2.4. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang mengukur kesuksesan sistem informasi menggunakan model kesuksesan sistem informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hariwibowo dan Setiawan (2020) memiliki variabel independen yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan, variabel mediasi yaitu kepuasan pengguna, dan variabel dependen yaitu *net benefits*. Penelitian ini mengambil objek pada Pemerintah Daerah Pedesaan dengan alat uji PLS. Hasil penelitian ini yaitu semua hipotesis dikonfirmasi, artinya kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap *net benefits*.

Berikutnya, Prameswara (2018) memiliki variabel independen kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan, variabel mediasi yaitu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, dan variabel dependen yaitu kinerja individu. Penelitian ini mengambil objek pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kota Denpasar dengan alat uji PLS. Hasil penelitian ini, yaitu kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem, kualitas sistem tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem, kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem, kualitas informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, kualitas sistem tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, penggunaan sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu, dan kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu.

Selain itu, Yasa (2017) memiliki variabel independen kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan, variabel mediasi yaitu penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, variabel dependen yaitu kinerja individu. Penelitian ini mengambil objek pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar dengan alat uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini yaitu kualitas informasi berpengaruh pada penggunaan sistem, kualitas sistem tidak berpengaruh pada penggunaan sistem, kualitas layanan tidak berpengaruh pada penggunaan sistem, kualitas informasi tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna, kualitas sistem tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna, kualitas layanan tidak berpengaruh pada

kepuasan pengguna, penggunaan sistem berpengaruh pada kinerja individu, dan kepuasan pengguna berpengaruh pada kinerja individu.

Selanjutnya, Tan *et al.* (2015) memiliki variabel independen kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, variabel mediasi intensitas penggunaan dan kepuasan pemakai, variabel dependen yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Penelitian ini mengambil objek pada SKPD Kabupaten Jepara dengan alat uji PLS. Hasil penelitian ini yaitu kualitas sistem berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai, intensitas penggunaan berpengaruh positif terhadap kinerja individu, kepuasan pemakai berpengaruh positif terhadap kinerja individu, dan kinerja individu berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Kemudian, Iivari (2005) memiliki variabel independen kualitas informasi, kualitas sistem, variabel mediasi yaitu penggunaan dan kepuasan pengguna, dan variabel dependen yaitu dampak individu. Penelitian ini mengambil objek pada Oulu *City Council* dengan alat uji PLS. Hasil penelitian ini yaitu kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna, kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap penggunaan, penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna,

kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap dampak individu, dan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak individu.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
Hariwibowo dan Setiawan (2020)	Independen: X1: Kualitas Informasi X2: Kualitas Sistem X3: Kualitas Layanan Dependen: Y: <i>Net Benefits</i> Mediasi: Z: Kepuasan Pengguna	Pemerintah Daerah Pedesaan Kabupaten Wonogiri	1. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 2. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 3. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna 4. Kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap <i>net benefits</i>
Prameswara (2018)	Independen: X1: Kualitas Informasi X2: Kualitas Sistem X3: Kualitas Layanan Dependen: Y: Kinerja Individu Mediasi: Z1: Penggunaan Sistem Z2: Kepuasan Pengguna	Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kota Denpasar	1. Kualitas informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem 2. Kualitas sistem tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem

			<p>3. Kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan sistem</p> <p>4. Kualitas informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>5. Kualitas sistem tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>6. Kualitas layanan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>7. Penggunaan sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu</p> <p>8. Kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu</p>
Yasa (2017)	Independen: X1: Kualitas Informasi X2: Kualitas Sistem X3: Kualitas Layanan	Sekretariat Daerah Bagian Keuangan	1. Kualitas informasi berpengaruh pada

	<p>Dependen: Y: Kinerja Individu</p> <p>Mediasi: Z1: Penggunaan Sistem Z2: Kepuasan Pengguna</p>	Kabupaten Gianyar	<p>penggunaan sistem</p> <p>2. Kualitas sistem tidak berpengaruh pada penggunaan sistem</p> <p>3. Kualitas layanan tidak berpengaruh pada penggunaan sistem</p> <p>4. Kualitas informasi tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna</p> <p>5. Kualitas sistem tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna</p> <p>6. Kualitas layanan tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna</p> <p>7. Penggunaan sistem berpengaruh pada kinerja individu</p> <p>8. Kepuasan pengguna berpengaruh pada kinerja individu</p>
Tan <i>et al.</i> (2015)	<p>Independen: X1: Kualitas Sistem X2: Kualitas Informasi X3: Kualitas Layanan</p> <p>Dependen: Y1: Kinerja Individu Y2: Kinerja Organisasi</p> <p>Mediasi: Z1: Intensitas Penggunaan Z2: Kepuasan Pemakai</p>	SKPD Kabupaten Jepara	<p>1. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan</p> <p>2. Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai</p> <p>3. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap</p>

			<p>intensitas penggunaan</p> <p>4. Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai</p> <p>5. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap intensitas penggunaan</p> <p>6. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai</p> <p>7. Intensitas penggunaan berpengaruh positif terhadap kinerja individu</p> <p>8. Kepuasan pemakai berpengaruh positif terhadap kinerja individu</p> <p>9. Kinerja individu berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi</p>
Iivari (2005)	<p>Independen: X1: Kualitas Sistem X2: Kualitas Informasi</p> <p>Dependen: Y: Dampak Individu</p> <p>Mediasi: Z1: Penggunaan Z2: Kepuasan Pengguna</p>	Oulu City Council	<p>1. Kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>2. Kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>3. Kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap penggunaan</p>

			<p>4. Kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan</p> <p>5. Kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap penggunaan</p> <p>6. Penggunaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna</p> <p>7. Kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap dampak individu</p> <p>8. Penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap dampak individu</p>
--	--	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Kualitas Informasi terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas informasi adalah karakteristik yang diinginkan dari *output* sistem yang mengukur kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan-laporan (*reports*) (DeLone dan McLean, 2003). Suatu informasi menjadi berkualitas jika informasi tersebut bermanfaat bagi pemakai informasi. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut terpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Kemudian, informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat jika pemakai

mempercayai informasi tersebut. Jika pemakai tidak dapat menerima informasi yang disajikan, akhirnya informasi akan menjadi tidak digunakan yang berarti tidak bermanfaat jika disediakan. Oleh karena itu, kualitas informasi juga harus sepadan dengan kualitas pemakai (Suwardjono, 2010). Menurut DeLone dan McLean (2003), kualitas informasi memengaruhi kepuasan pengguna. Jika suatu informasi berkualitas maka pengguna akan merasa puas dan menunjukkan sikap atau tanggapan positif terhadap suatu informasi yang diterimanya.

Menurut Hariwibowo dan Setiawan (2020), kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna pada Pemerintah Daerah Pedesaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Tan *et al.* (2015) menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai pada SKPD Kabupaten Jepara. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iivari (2005) juga menunjukkan bahwa kualitas informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna pada *Oulu City Council*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H₁: Kualitas Informasi berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

2.5.2. Pengaruh Kualitas Sistem terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas sistem adalah performa dari sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan *hardware* dan *software* dari sistem informasi dapat menyediakan kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan McLean, 2003). Davis (1989) mengusulkan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi

pengguna untuk menerima dan menggunakan teknologi informasi karena pengguna percaya bahwa sistem akan meningkatkan kinerja. Semakin baik kualitas suatu sistem maka pengguna akan semakin puas (DeLone dan McLean, 2003). Selaras dengan Hartono (2007), semakin tinggi kualitas sistem akan menyebabkan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, yang selanjutnya akan memengaruhi secara positif produktivitas individu dengan hasil peningkatan produktivitas organisasi.

Menurut Hariwibowo dan Setiawan (2020), kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna pada Pemerintah Daerah Pedesaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Tan *et al.* (2015) menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai pada SKPD Kabupaten Jepara. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iivari (2005) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna pada *Oulu City Council*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H₂: Kualitas Sistem berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

2.5.3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pengguna

Kualitas layanan adalah kualitas dukungan yang pengguna sistem terima dari departemen sistem informasi dan dukungan personil TI (DeLone dan McLean, 2003). Kualitas layanan merupakan variabel tambahan yang dimasukkan ke dalam model terbaru. Hal tersebut disebabkan karena dukungan

yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pengguna merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan (DeLone dan McLean, 2003). Menurut DeLone dan McLean (2003) semakin baik kualitas layanan maka kepuasan pengguna juga akan meningkat. Hal ini karena, pengguna akan menunjukkan sikap positif dan puas ketika pengguna mendapatkan layanan bantuan yang berkualitas, seperti layanan yang memuaskan, layanan bantuan yang baik, dan tepat dari penyedia layanan.

Menurut Hariwibowo dan Setiawan (2020), kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna pada Pemerintah Daerah Pedesaan Kabupaten Wonogiri. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Tan *et al.* (2015) yang menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pemakai pada SKPD Kabupaten Jepara.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas layanan terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H₃: Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna

2.5.4. Pengaruh Kepuasan Pengguna terhadap Manfaat Bersih

Kepuasan pengguna (*user satisfaction*) merupakan respon dan umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi. Sikap pengguna terhadap sistem informasi merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka pengguna terhadap sistem yang digunakan (DeLone dan McLean, 1992). Kepuasan pengguna adalah sejauh mana pengguna percaya bahwa sistem informasi yang tersedia memenuhi kebutuhan informasi pengguna (DeLone dan

McLean, 2003). Kepuasan pengguna juga sering digunakan sebagai ukuran pengganti efektivitas sistem informasi. Jika sistem yang efektif didefinisikan sebagai salah satu yang memberikan nilai tambah bagi organisasi, maka sistem yang efektif harus memiliki beberapa pengaruh positif pada pengguna, seperti meningkatkan produktivitas dan pengambilan keputusan (DeLone dan McLean, 2003). Akibat dari kepuasan pengguna atas suatu sistem informasi, maka manfaat bersih akan terjadi. Jika kepuasan pengguna dirasakan oleh pengguna maka akan membuat manfaat bersih juga mudah dicapai (DeLone dan McLean, 2003).

Menurut Hariwibowo dan Setiawan (2020), kepuasan pengguna berpengaruh positif terhadap *net benefits* pada Pemerintah Daerah Pedesaan Kabupaten Wonogiri. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Prameswara (2018) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kota Denpasar. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2017) yang menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh pada kinerja individu pada Sekretariat Daerah Bagian Keuangan Kabupaten Gianyar. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tan *et al.* (2015) menunjukkan bahwa kepuasan pemakai berpengaruh positif terhadap kinerja individu pada SKPD Kabupaten Jepara. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iivari (2005) menunjukkan bahwa kepuasan pengguna berpengaruh signifikan terhadap dampak individu pada Oulu *City Council*.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel kepuasan pengguna terhadap *net benefits*. Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

H₄: Kepuasan Pengguna berpengaruh positif terhadap Manfaat Bersih



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan analisa dari pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kualitas Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur positif sebesar 0,332 dan *p-value* sebesar $0,005 < 0,05$ (*alpha*). Semakin tinggi Kualitas Informasi maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepuasan Pengguna. Kriteria Kualitas Informasi meliputi kelengkapan (*completeness*), relevansi (*relevance*), kemudahan memahami (*ease of understanding*), ketepatan (*accuracy*), dan ketepatan waktu (*timeliness*).
2. Kualitas Sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur positif sebesar 0,352 dan *p-value* sebesar $0,003 < 0,05$ (*alpha*). Meskipun terdapat indikator dari Kualitas Sistem yang dihapus karena tidak valid, tetapi Kualitas Sistem menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna dibandingkan dengan dua variabel kualitas lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.11 yang menunjukkan nilai koefisien jalur pada setiap variabel. Semakin tinggi Kualitas Sistem maka akan semakin tinggi pula tingkat Kepuasan Pengguna. Kriteria Kualitas Sistem meliputi kegunaan

(*usability*), fleksibilitas (*flexibility*), keandalan (*reliability*), integrasi (*integration*), waktu merespon (*response time*).

3. Kualitas Layanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Pengguna. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur positif sebesar 0,104 dan *p-value* sebesar $0,225 > 0,05$ (*alpha*). Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tidak diterima. Kualitas Layanan memiliki kriteria responsif (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), program pelatihan (*training program*), dan empati (*empathy*). Jika mengacu pada statistik deskriptif yang ada pada tabel 4.3, responden secara rata-rata cenderung menjawab setuju bahwa layanan yang diberikan oleh BPKP sebagai penyedia layanan berkualitas. Sekalipun demikian, bukan hal tersebut yang menjadi alasan pengguna merasa puas. Peningkatan pada Kualitas Layanan oleh BPKP ternyata tidak memengaruhi tingkat Kepuasan Pengguna. Menurut hasil penelitian, alasan utama pengguna tidak merasa puas meskipun mendapatkan layanan yang baik adalah karena sudah menjadi kebutuhan dalam menggunakan SIMDA SAKIP. Pengguna menghasilkan laporan kinerja dari SIMDA SAKIP. Layanan yang baik dari BPKP dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 dimana secara rata-rata jawaban responden cenderung setuju pada variabel Kualitas Layanan. Jika dilihat dari jawaban responden pada kuesioner, sebanyak 18 dari 50 responden menjawab netral pada indikator KL.1 yang menyatakan bahwa BPKP memberikan tanggapan yang cepat kepada pengguna ketika terjadi permasalahan pada SIMDA SAKIP. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPKP tidak selalu memberikan

tanggapan yang cepat ketika pengguna mengalami masalah pada SIMDA SAKIP, sehingga mengakibatkan pengguna kurang merasa puas. Alasan yang lain adalah pengguna tidak peduli baik atau tidak kualitas layanan yang diberikan oleh BPKP karena SIMDA SAKIP merupakan sistem yang wajib digunakan.

4. Kepuasan Pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manfaat Bersih. Hal ini ditunjukkan dari nilai koefisien jalur positif sebesar 0,838 dan *p-value* sebesar $<0,001 < 0,05$ (*alpha*). Semakin tinggi Kepuasan Pengguna maka akan menyebabkan Manfaat Bersih yang lebih tinggi. Kriteria Kepuasan Pengguna meliputi opini pelanggan tentang layanan (*customer opinion of service*) dan survei pengguna (*user surveys*).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penelitian ini menjawab tujuan penelitian secara keseluruhan, yaitu bahwa implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo berdampak positif terhadap kinerja OPD yang merupakan manfaat bersih dari penelitian ini. Selain itu peneliti juga memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan sistem informasi (SIMDA SAKIP). Untuk mencapai tujuan ini peneliti telah melakukan analisis berdasarkan data survei yang diperoleh dari pengguna SIMDA SAKIP. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, implementasi SIMDA SAKIP dapat dikatakan sukses. Hal ini ditunjukkan dengan mayoritas jawaban pengguna yang cenderung setuju pada pernyataan dari kelima variabel. Kemudian faktor yang memengaruhi kesuksesan SIMDA SAKIP adalah kualitas informasi, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. SIMDA SAKIP

dirasakan telah memberikan manfaat bagi pengguna maupun OPD, yaitu sistem yang mudah digunakan dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Manfaat yang dirasakan dipengaruhi oleh kepuasan pengguna. Pengguna merasa puas dengan kualitas informasi yang disajikan, dan kualitas sistem dari SIMDA SAKIP. Namun kualitas layanan tidak memengaruhi kepuasan pengguna.

5.2. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi SIMDA SAKIP yang dilakukan oleh Kabupaten Purworejo tidak sia-sia. Responden (pengguna) memiliki jawaban secara rata-rata cenderung setuju bahwa implementasi SIMDA SAKIP sukses. SIMDA SAKIP yang dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian PANRB memiliki tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Kabupaten Purworejo menyambut positif dikembangkannya SIMDA SAKIP agar tercapai kinerja dan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Melalui inisiatif sendiri, Kabupaten Purworejo mengimplementasikan SIMDA SAKIP sejak tahun 2018 dan menjadi kabupaten pertama yang mengimplementasikan SIMDA SAKIP. Kabupaten Purworejo tidak sia-sia dalam mengimplementasikan SIMDA SAKIP, karena jika dilihat pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden (pengguna) secara rata-rata cenderung menjawab setuju pada variabel Manfaat Bersih (MB) yang berisikan indikator mengenai kinerja. Persoalan yang ada pada Kabupaten Purworejo mengenai kurangnya sumber daya manusia menjadi dapat teratasi. Dengan sistem yang tepat dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghasilkan pelaporan kinerja yang telah terintegrasi dengan proses

perencanaan dan keuangan secara efektif dan efisien. Sasaran program dan kegiatan harus sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu untuk pembangunan daerah. Hasil laporan kinerja tersebut akan digunakan untuk evaluasi kinerja. Selain itu, laporan kinerja yang dihasilkan dari SIMDA SAKIP digunakan untuk pedoman dalam penyusunan LKjIP. Namun, terkait dengan penyusunan LKjIP tahun 2018, masih terdapat kekurangan dalam pengungkapan data dan informasi capaian kinerja pemerintah daerah, seperti belum menggambarkan integrasi antara sistem perencanaan pembangunan, sistem pembangunan, penganggaran, dan sistem akuntabilitas kinerja. Hal tersebut menunjukkan belum sepenuhnya menggambarkan penggunaan APBD tahun 2018. Permasalahan mengenai integrasi sistem tersebut yaitu dalam SIMDA SAKIP satu program hanya dapat diisi oleh satu penanggung jawab, sementara pada beberapa OPD di Kabupaten Purworejo dalam satu program memiliki beberapa penanggung jawab. Karena SIMDA SAKIP merupakan sistem baru di Kabupaten Purworejo sehingga hal tersebut membuat pengguna merasa kesulitan dalam pengungkapan data dan informasi capaian kinerja. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan kesuksesan implementasi SIMDA SAKIP pada Kabupaten Purworejo diperlukan kapabilitas sumber daya manusia yang menguasai pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan perencanaan dan keuangan secara komprehensif dengan penempatan tenaga akuntansi, sehingga tidak ada bidang akuntansi yang ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Dalam penelitian ini telah dipaparkan bahwa kinerja sebagai ukuran dalam variabel Manfaat Bersih dinilai sudah efektif dan efisien. Semakin tinggi tingkat

kepuasan pengguna maka manfaat yang dirasakan oleh pengguna juga semakin tinggi. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat kesuksesan yang lebih tinggi dari sisi manfaat yang dirasakan maka para pemangku kepentingan perlu fokus kepada peningkatan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dipengaruhi oleh informasi dan sistem. Dari kedua komponen kualitas tersebut, kualitas sistem menjadi variabel yang paling berpengaruh. Hal ini dapat membantu pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam hal yang dapat membuat SIMDA SAKIP semakin sukses.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

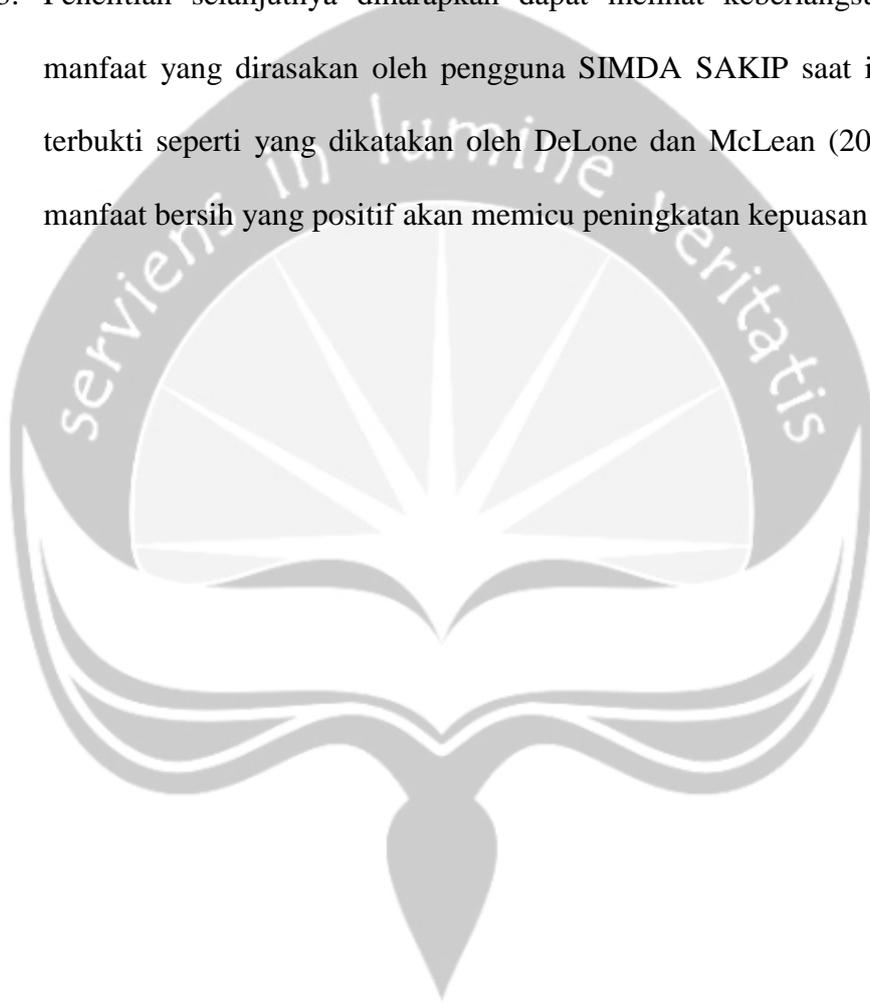
1. Karena peneliti melakukan penelitian pada saat wabah covid 19, maka peneliti meninggalkan kuesioner kepada responden yang dapat berdampak pada jawaban responden yang tidak bisa menggambarkan fenomena sesungguhnya dikarenakan peneliti tidak dapat mendampingi responden pada saat mengisi instrumen.

5.4. Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditunjukkan pada pembahasan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Permasalahan SIMDA SAKIP pada OPD Kabupaten Purworejo mengenai satu program hanya dapat diisi oleh satu penanggung jawab, menurut peneliti hal tersebut dapat diatasi dengan memasukkan jumlah program sesuai dengan jumlah penanggung jawabnya.

2. Mengingat pengguna SIMDA SAKIP hanya terdiri dari satu hingga dua orang, maka diharapkan posisi pengguna ditempati oleh sumber daya manusia yang menguasai pelaporan kinerja dan berlatar belakang pendidikan akuntansi.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melihat keberlangsungan dari manfaat yang dirasakan oleh pengguna SIMDA SAKIP saat ini, apakah terbukti seperti yang dikatakan oleh DeLone dan McLean (2003) bahwa manfaat bersih yang positif akan memicu peningkatan kepuasan pengguna.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Davis, F.D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.
- DeLone, W.H., dan McLean, E.R. (1992). Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. *Information System Research*, 3(1), 60-95.
- DeLone, W.H., dan McLean, E.R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30.
- DeLone, W.H., dan McLean, E.R. (2016). Information Systems Success Measurement. *Information Systems*, 2(1), 1-116.
- Gable, G.G., Sedera, D., dan Chan, T. (2008). Re-conceptualizing Information System Success: The IS-Impact Measurement Model. *Journal of the Association for Information Systems*, 9(7), 377-408.
- Hariwibowo, I.N., dan Setiawan, W.Y. (2020). Evaluating the Implementation of the Rural Financial System (SISKEUDES) in Wonogiri Regency, Indonesia: Success or Failure?. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 9(3), 101-114.
- Hartono, J. (2007). *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE UGM.
- Iivari, J. (2005). An Empirical Test of the DeLone-McLean Model of Information System Success. *The Data Base for Advances in Information Systems*, 36(2), 8-27.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Nordiawan, D., dan Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
- Petter, S., DeLone, W.H., dan McLean, E.R. (2008). Measuring Information Systems Success: Models, Dimensions, Measures, and Interrelationships. *European Journal of Information Systems*, 17(3), 236-263.
- Prameswara, I.G.A.B.P. (2018). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Keuangan Daerah dengan Mengadopsi Model DeLone & McLean. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(1), 196-223.
- Sholihin, M., dan Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM – PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Suwardjono. (2010). *Teori Akuntansi: Pengungkapan dan Sarana Interpretatif* (Edisi 3). Yogyakarta: BPFE.
- Tan, D., Suyatno, dan Aliyah, S. (2015). Pengujian Kesuksesan Sistem Informasi Model DeLone & McLean pada Sektor Publik. *University Research Colloquium*, 111-122.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Yasa, I.W.E.S. (2017). Analisis Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dengan Mengadopsi Model DeLone & McLean. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2505-2533.

DAFTAR REFERENSI

- BPKP. (2019, Februari 26). *BPKP dan Kementerian PAN RB Luncurkan SIMDA SAKIP*. Diakses pada 4 Maret 2020, dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/21555/0/BPKP-dan-Kementerian-PAN-RB-Luncurkan-SIMDA-SAKIP.bpkp>.
- BPKP. (2019, Maret 15). *Kabupaten Purworejo, Pertama Implementasikan SIMDA SAKIP*. Diakses pada 3 Maret 2020, dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/21671/1480/Kabupaten-Purworejo-Pertama-Implementasikan-SIMDA-SAKIP.bpkp>.
- Cnnindonesia. (2017, November 22). *Kemenkeu Ungkap 'Kekacauan' Pengelolaan Anggaran Daerah*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171122184850-532-257447/kemenkeu-ungkap-kekacauan-pengelolaan-anggaran-daerah>.
- Kemenkeu. (2017, Desember 8). *Optimalkan APBN dan APBD Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Diakses pada 10 Maret 2020, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/optimalikan-apbn-dan-apbd-untuk-kesejahteraan-rakyat/>.



Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP PADA KABUPATEN PURWOREJO”

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian untuk penyusunan tugas akhir (skripsi) pada Program Studi Sarjana (S1) Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan topik “Evaluasi Terhadap Implementasi SIMDA SAKIP Pada Kabupaten Purworejo”, saya Arum Wandira (mahasiswa) memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan dipergunakan hanya untuk kepentingan akademis semata. Kiranya Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab sesuai fakta yang Bapak/Ibu/Saudara/i alami terkait pengalaman menggunakan aplikasi SIMDA SAKIP.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Arum Wandira

KUESIONER PENELITIAN

Nomor Responden :(Diisi oleh peneliti)

IDENTITAS RESPONDEN

(Kriteria: Aparatur organisasi perangkat daerah sebagai pengguna SIMDA SAKIP)

1. Nama : _____
2. Instansi : _____
3. Jabatan : _____
4. Jenis Kelamin :
(Pilih salah satu)
 Pria Wanita
5. Usia :
(Pilih salah satu)
 < 25 Tahun 36 - 45 Tahun > 55 Tahun
 25 - 35 Tahun 46 - 55 Tahun
6. Lama Menduduki Jabatan :
(Pilih salah satu)
 < 1 Tahun 3 - 4 Tahun
 1 - 2 Tahun > 4 Tahun
7. Pendidikan Terakhir :
(Pilih salah satu)
 SMA D4 S2
 D3 S1 S3
*Jurusan : _____

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Terimakasih Bapak/Ibu/Saudara/i telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pernyataan — pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (√).

Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan tersebut.

Keterangan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
Skor	1	2	3	4	5

Kuesioner ini terdiri dari lima bagian pernyataan. Bagian pernyataan pertama mengenai kualitas informasi yang terdiri dari 7 (tujuh) butir pernyataan. Bagian pernyataan kedua mengenai kualitas sistem yang terdiri dari 6 (enam) butir pernyataan. Bagian pernyataan ketiga mengenai kualitas layanan terdiri dari 4 (empat) butir pernyataan. Bagian pernyataan keempat mengenai kepuasan pengguna terdiri dari 4 (empat) butir pernyataan. Bagian pernyataan kelima mengenai manfaat bersih terdiri dari 4 (empat) butir pernyataan.

DAFTAR PERNYATAAN

Kualitas Informasi (*Information Quality*)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Kelengkapan (<i>Completeness</i>)						
1	SIMDA SAKIP memberikan informasi (laporan) yang lengkap untuk saya gunakan.					
Relevansi (<i>Relevance</i>)						
2	SIMDA SAKIP memberikan informasi (laporan) sesuai dengan kebutuhan saya.					
3	SIMDA SAKIP menghasilkan informasi (laporan) yang dapat saya gunakan untuk mendukung kinerja.					
Kemudahan Memahami (<i>Ease of Understanding</i>)						
4	SIMDA SAKIP memberikan informasi (laporan) yang mudah untuk saya pahami/jelas.					
Ketepatan (<i>Accuracy</i>)						
5	SIMDA SAKIP memberikan informasi (laporan) yang akurat untuk saya gunakan.					
6	SIMDA SAKIP memberikan informasi (laporan) yang dapat dipercaya untuk saya gunakan.					
Ketepatan Waktu (<i>Timeliness</i>)						
7	SIMDA SAKIP menghasilkan informasi (laporan) yang saya butuhkan tepat waktu.					

Kualitas Sistem (System Quality)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Kegunaan (Usability)						
1	SIMDA SAKIP mudah saya gunakan.					
Fleksibilitas (Flexibility)						
2	SIMDA SAKIP dapat disesuaikan dengan kebutuhan saya.					
Keandalan (Reliability)						
3	Kinerja SIMDA SAKIP dapat saya andalkan.					
Integrasi (Integration)						
4	SIMDA SAKIP dapat saya integrasikan (gabungkan) dengan data internal yang telah ada sebelumnya.					
5	SIMDA SAKIP dapat saya integrasikan (gabungkan) dengan data yang berasal dari sistem lain.					
Waktu Merespon (Response Time)						
6	SIMDA SAKIP merespon dengan cepat ketika saya gunakan untuk bekerja.					

Kualitas Layanan (Service Quality)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Responsif (Responsiveness)						
1	BPKP memberikan tanggapan yang cepat kepada saya saat terjadi permasalahan dengan SIMDA SAKIP.					

Jaminan (<i>Assurance</i>)					
2	BPKP memiliki pengetahuan yang memadai untuk menangani permasalahan yang saya hadapi pada SIMDA SAKIP dengan baik.				
Program Pelatihan (<i>Training Program</i>)					
3	Saya sebagai pengguna SIMDA SAKIP mendapat pelatihan yang cukup untuk mampu mengoperasikan SIMDA SAKIP.				
Empati (<i>Empathy</i>)					
4	BPKP memberikan dukungan dan perhatian terhadap penggunaan SIMDA SAKIP yang saya gunakan.				

Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Opini Pelanggan tentang Layanan (<i>Customer Opinion of Service</i>)						
1	Saya puas dengan layanan atau dukungan bagian organisasi (admin) terhadap pengguna SIMDA SAKIP.					
Survei Pengguna (<i>User Surveys</i>)						
2	Secara keseluruhan, penerapan SIMDA SAKIP sesuai dengan harapan saya.					
3	SIMDA SAKIP merupakan sistem tepat untuk pekerjaan saya.					
4	Secara keseluruhan, saya puas terhadap penerapan SIMDA SAKIP.					

Manfaat Bersih (Net Benefits)

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
		STS	TS	N	S	SS
Efisiensi di Tempat Kerja (Efficiency at Work)						
1	Penerapan SIMDA SAKIP telah meningkatkan efisiensi saya dalam bekerja.					
Keefektifan Pengaturan (Regulatory Effectiveness)						
2	Saya merasa penerapan SIMDA SAKIP sangat efektif untuk pelaksanaan regulasi pemerintah terkait pengelolaan keuangan daerah.					
Kinerja Pekerjaan (Job Performance)						
3	Saya merasa terbantu dengan adanya penerapan SIMDA SAKIP membuat proses penganggaran dan pertanggungjawaban menjadi lebih baik.					
4	Saya merasa terbantu dalam pengelolaan keuangan dengan menggunakan SIMDA SAKIP.					

Responden

(.....)

Lampiran 2: Tabulasi Data Kuesioner Penelitian

Konstruk	Sekretariat Daerah	Sekretariat Dewan		Inspektorat Daerah		Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kesehatan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
KI.1	4	3	2	4	2	4	5	4	3	5
KI.2	4	4	4	4	4	3	5	4	3	5
KI.3	4	4	4	4	4	4	5	5	3	5
KI.4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	5
KI.5	3	5	5	4	3	4	5	5	3	5
KI.6	4	4	5	4	4	4	5	4	3	5
KI.7	4	4	4	4	2	3	5	4	4	5
KS.1	2	4	4	4	5	3	5	4	4	4
KS.2	4	4	4	4	2	2	5	4	4	4
KS.3	2	4	5	4	3	3	5	3	2	5
KS.4	3	5	5	4	4	4	5	4	3	4
KS.5	3	2	2	4	3	3	5	4	2	4
KS.6	4	3	3	3	3	2	5	4	3	4
KL.1	5	4	4	4	4	4	3	3	3	4
KL.2	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4
KL.3	4	4	4	4	2	4	3	4	4	5
KL.4	4	5	5	4	3	4	3	4	4	5
KP.1	2	4	4	4	3	4	3	3	3	4
KP.2	2	2	2	4	2	3	4	3	2	5
KP.3	3	2	2	4	4	3	5	3	4	5
KP.4	2	2	2	4	2	2	5	3	2	5
MB.1	2	3	3	4	4	3	5	3	2	5
MB.2	3	4	4	4	2	3	5	3	4	5
MB.3	3	4	4	4	4	4	5	4	3	5
MB.4	3	4	4	4	4	4	5	3	2	5

Konstruk	Dinas Perhubungan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		Dinas PMPTSP	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
KI.1	4	5	4	4	4	4	4	4
KI.2	4	4	4	4	4	4	4	4
KI.3	4	4	4	4	4	4	4	4
KI.4	4	4	4	3	4	4	4	4
KI.5	4	5	3	3	4	4	3	4
KI.6	4	5	4	4	4	4	4	4
KI.7	2	4	3	4	4	4	3	4
KS.1	4	4	4	4	4	4	3	4
KS.2	2	4	3	4	4	4	3	3
KS.3	4	4	3	4	4	4	3	4
KS.4	2	5	3	4	4	4	3	3
KS.5	2	4	3	3	4	4	2	3
KS.6	3	4	3	4	4	4	3	4
KL.1	3	5	3	4	4	4	2	3
KL.2	4	5	3	4	4	4	4	3
KL.3	2	5	4	4	4	4	3	3
KL.4	4	5	3	4	4	4	3	3
KP.1	3	5	3	4	4	4	3	3
KP.2	4	5	3	3	4	4	3	3
KP.3	4	5	3	3	4	4	3	4
KP.4	2	5	3	4	4	4	3	4
MB.1	4	5	4	3	4	4	2	4
MB.2	4	5	3	4	4	4	3	3
MB.3	4	4	3	4	4	4	3	4
MB.4	4	4	3	4	4	4	3	4

Konstruk	SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran	BAPPEDA	Badan Kepegawaian Daerah		BPPKAD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Kantor Kesbangpol	Kecamatan Grabag	
KI.1	4	4	4	4	2	2	2	4	4	4
KI.2	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4
KI.3	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4
KI.4	4	4	4	4	3	2	2	4	4	4
KI.5	3	4	4	4	2	2	2	4	3	4
KI.6	4	4	4	3	4	2	2	4	3	4
KI.7	3	3	4	3	2	2	2	4	4	4
KS.1	4	4	4	4	4	2	2	3	4	3
KS.2	4	4	3	3	2	2	2	3	4	3
KS.3	3	3	4	3	3	2	2	3	4	4
KS.4	4	4	2	4	4	2	2	4	3	4
KS.5	3	4	2	4	2	2	2	4	3	4
KS.6	3	2	4	3	4	2	2	3	4	4
KL.1	4	4	3	4	4	2	2	2	4	4
KL.2	4	4	4	4	4	2	2	2	5	4
KL.3	4	2	4	4	4	1	2	4	4	4
KL.4	4	4	4	4	4	2	3	3	5	5
KP.1	4	4	4	3	4	1	2	3	4	3
KP.2	4	4	3	4	2	1	2	3	4	4
KP.3	4	4	4	4	2	2	3	3	4	4
KP.4	4	4	3	3	2	2	2	3	4	4
MB.1	4	3	3	4	2	1	2	3	4	4
MB.2	4	4	4	4	4	1	3	4	4	4
MB.3	4	4	4	3	3	1	3	4	4	4
MB.4	4	3	4	3	3	1	2	4	4	4

Konstruk	Kecamatan Ngombol	Kecamatan Purwodadi	Kecamatan Bagelen	Kecamatan Kaligesing	Kecamatan Purworejo	Kecamatan Banyuurip	Kecamatan Bayan
KI.1	4	4	4	4	4	2	4
KI.2	3	4	4	4	4	2	4
KI.3	3	4	4	4	4	2	4
KI.4	3	4	4	4	3	2	4
KI.5	4	4	4	4	3	2	3
KI.6	4	4	4	4	3	2	3
KI.7	4	3	4	4	4	2	4
KS.1	3	3	4	4	4	2	4
KS.2	4	3	4	3	3	2	2
KS.3	4	3	4	3	3	2	2
KS.4	3	4	4	4	4	2	4
KS.5	3	4	3	3	1	2	4
KS.6	3	3	4	3	3	2	4
KL.1	4	3	3	3	3	2	4
KL.2	4	4	4	4	3	4	5
KL.3	3	4	4	4	5	2	4
KL.4	4	4	4	3	4	2	5
KP.1	3	3	5	4	3	2	4
KP.2	4	3	4	4	4	2	4
KP.3	4	4	4	4	3	2	4
KP.4	4	3	4	4	4	2	4
MB.1	3	4	4	4	3	2	4
MB.2	4	4	4	4	4	2	4
MB.3	3	3	5	4	3	2	4
MB.4	3	3	5	4	3	2	4

Konstruk	Kecamatan Kutoarjo	Kecamatan Pituruh	Kecamatan Kemiri	Kecamatan Bruno	Kecamatan Gebang	Kecamatan Loano	Kecamatan Bener
KI.1	4	4	2	4	4	4	5
KI.2	4	3	3	4	4	4	5
KI.3	4	4	4	4	4	4	5
KI.4	4	3	2	4	4	4	5
KI.5	3	3	2	4	4	4	5
KI.6	4	4	3	4	4	4	5
KI.7	3	4	2	4	4	3	5
KS.1	3	4	4	4	4	4	4
KS.2	4	4	4	4	4	4	4
KS.3	3	3	3	2	4	3	3
KS.4	3	3	3	4	4	3	3
KS.5	3	3	3	4	3	4	3
KS.6	4	4	3	4	4	2	4
KL.1	3	4	3	4	3	3	4
KL.2	4	4	5	4	3	4	4
KL.3	3	4	4	2	3	3	4
KL.4	4	4	4	4	3	4	4
KP.1	4	4	5	4	4	4	4
KP.2	4	4	3	4	4	5	4
KP.3	4	3	4	4	4	4	4
KP.4	4	4	3	2	4	4	4
MB.1	3	4	3	4	4	4	4
MB.2	4	4	4	4	4	4	4
MB.3	3	4	3	4	4	4	4
MB.4	3	4	3	4	4	4	4

Lampiran 3: Hasil Statistik Deskriptif

Statistics

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
KI.1	50	0	3,74	,828	2	5
KI.2	50	0	3,78	,679	2	5
KI.3	50	0	3,84	,681	2	5
KI.4	50	0	3,72	,730	2	5
KI.5	50	0	3,68	,844	2	5
KI.6	50	0	3,84	,681	2	5
KI.7	50	0	3,50	,863	2	5
KS.1	50	0	3,70	,735	2	5
KS.2	50	0	3,40	,782	2	5
KS.3	50	0	3,36	,827	2	5
KS.4	50	0	3,58	,810	2	5
KS.5	50	0	3,12	,824	1	5
KS.6	50	0	3,36	,749	2	5
KL.1	50	0	3,50	,763	2	5
KL.2	50	0	3,80	,756	2	5
KL.3	50	0	3,56	,907	1	5
KL.4	50	0	3,86	,756	2	5
KP.1	50	0	3,50	,839	1	5
KP.2	50	0	3,38	,945	1	5
KP.3	50	0	3,60	,756	2	5
KP.4	50	0	3,28	,948	2	5
MB.1	50	0	3,42	,906	1	5
MB.2	50	0	3,74	,751	1	5
MB.3	50	0	3,72	,701	1	5
MB.4	50	0	3,64	,776	1	5

Lampiran 4: Hasil Uji Validitas Konvergen

Latent Variable Coefficients

	KI	KS	KL	KP	MB
R-squared				0.532	0.703
Adj. R-squared				0.502	0.697
Composite reliab.	0.951	0.859	0.874	0.911	0.929
Cronbach's alpha	0.940	0.795	0.807	0.868	0.896
Avg. var. extrac.	0.737	0.550	0.637	0.721	0.766
Full collin. VIF	3.336	3.696	1.585	2.731	4.775
Q-squared				0.539	0.698
Min	-2.705	-2.564	-2.991	-2.594	-3.881
Max	1.961	2.622			



Lampiran 5: Hasil Uji Validitas Diskriminan

Loading dan Cross Loading

	Kualitas Informasi	Kualitas Sistem	Kualitas Layanan	Kepuasan Pengguna	Manfaat Bersih
KL.1	(0.841)	-0.477	-0.011	0.573	-0.244
KL.2	(0.906)	0.092	-0.009	0.028	-0.003
KL.3	(0.862)	0.004	0.127	-0.039	-0.011
KL.4	(0.917)	-0.160	-0.025	0.054	-0.091
KL.5	(0.837)	-0.071	-0.085	-0.423	0.477
KL.6	(0.837)	0.205	-0.017	-0.389	0.394
KL.7	(0.803)	0.434	0.022	0.195	-0.535
KS.1	-0.328	(0.783)	-0.102	0.150	0.251
KS.2	0.310	(0.703)	0.031	0.291	-0.707
KS.3	-0.223	(0.774)	-0.172	-0.237	0.574
KS.4	0.112	(0.692)	0.263	-0.419	0.248
KS.6	0.177	(0.752)	0.012	0.202	-0.419
KL.1	0.033	0.119	(0.825)	-0.075	-0.005
KL.2	-0.174	0.102	(0.752)	0.587	-0.481
KL.3	0.206	-0.022	(0.717)	-0.246	0.082
KL.4	-0.050	-0.180	(0.886)	-0.228	0.347
KP.1	-0.504	0.365	0.410	(0.726)	0.270
KP.2	0.225	-0.406	0.026	(0.930)	0.069
KP.3	0.128	-0.209	-0.158	(0.839)	0.081
KP.4	0.056	0.325	-0.214	(0.887)	-0.370
MB.1	0.071	-0.032	-0.060	0.486	(0.855)
MB.2	-0.084	0.315	0.196	0.381	(0.780)
MB.3	0.024	-0.118	-0.064	-0.385	(0.926)
MB.4	-0.019	-0.118	-0.046	-0.383	(0.931)

Lampiran 6: Hasil Uji Reliabilitas

Latent Variable Coefficients

	KI	KS	KL	KP	MB
R-squared				0.532	0.703
Adj. R-squared				0.502	0.697
Composite reliab.	0.951	0.859	0.874	0.911	0.929
Cronbach's alpha	0.940	0.795	0.807	0.868	0.896
Avg. var. extrac.	0.737	0.550	0.637	0.721	0.766
Full collin. VIF	3.336	3.696	1.585	2.731	4.775
Q-squared				0.539	0.698
Min	-2.705	-2.564	-2.991	-2.594	-3.881
Max	1.961	2.622			



Lampiran 7: Hasil Uji *Goodness of Fit*

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.406, $P < 0.001$

Average R-squared (ARS)=0.617, $P < 0.001$

Average adjusted R-squared (AARS)=0.599, $P < 0.001$

Average block VIF (AVIF)=2.958, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Average full collinearity VIF (AFVIF)=3.225, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3

Tenenhaus GoF (GoF)=0.649, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36

Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1

R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1

Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7

Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7



Lampiran 8: Hasil *Path Coefficients* dan *P Values*

Path coefficients					
	KI	KS	KL	KP	MB
KI					
KS					
KL					
KP	0.332	0.352	0.104		
MB				0.838	

P values					
	KI	KS	KL	KP	MB
KI					
KS					
KL					
KP	0.005	0.003	0.225		
MB				<0.001	

Lampiran 9: Tampilan SIMDA SAKIP





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmtsp@purworejakab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 562.42/090/2020

I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

II. Menunjuk : 1301/R/I TANGGAL 08 APRIL 2020

III. Bupati Purworejo memberi Surat Keterangan Penelitian untuk melaksanakan Penelitian dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ✓ Nama : ARUM WANDIRA
- ✓ Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
- ✓ NIM/NIP/KTP/ dll. : 3306067101980001
- ✓ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- ✓ Program Studi : AKUNTANSI
- ✓ Jurusan : EKONOMI
- ✓ Alamat : JL. KOLONEL SUGIYONO NO.11 A,PURWOREJO Kec. PURWOREJO Kab. PURWOREJO
- ✓ No. Telp. : 081259131971
- ✓ Penanggung Jawab : Ignatius Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc
- ✓ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ✓ Bidang Penelitian : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
- ✓ Judul : EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI SIMDA SAKIP PADA KABUPATEN PURWOREJO
- ✓ Lokasi : SEMUA OPD KABUPATEN PURWOREJO KECUALI RSUD
- ✓ Lama Penelitian : 2 BULAN
- ✓ Jumlah Peserta : 1

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya menyampaikan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KESBANGPOL Kab. Purworejo dan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Kesbangpol Kab. Purworejo;
2. Semua OPD Se-Kabupaten Purworejo (Kecuali RSUD)

Dikeluarkan : Purworejo

Pada Tanggal : 15 April 2020

a.n. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS,



FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM.

Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008